

RENCANA KERJA TAHUN 2025



*DINAS PERTANIAN PANGAN DAN
PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2025, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dokumen ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

.Rencana Kerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang, APBD Provinsi dan APBN, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu

Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan evaluasi penyelenggaraan pembangunan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Februari 2024
Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
Kota Tanjungpinang,



YONI FADRI
Pembina Tingkat I
NIP. 19700503 200312 1 006

DAFTAR ISI

Halaman	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	12
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	17
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2. Tujuan dan Sasaran OPD.....	17
3.2. Program dan Kegiatan.....	18
BAB IV. PENUTUP	26
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2023 telah ditetapkan RPD Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan Pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2023 sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan masa transisi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Organisasi mempunyai tugas membantu urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan untuk pelaksanaan urusan pangan, pertanian dan perikanan. Sebagai implementasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian Kinerja Pj Walikota dalam mengemban amanat Presiden maka Dinas Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang perlu menyusun Rencana Perangkat Daerah. Rencana Perangkat Daerah tersebut adalah Rencana strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Daerah (Renja). Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
11. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2017 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang

Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);

13. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026;
15. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Perincian tugas dan fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 43);
16. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah :

- Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD mempunyai maksud sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun sebelumnya dan perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2025
- Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD adalah untuk memasukkan Rencana Program / kegiatan di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang, yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program / kegiatan Tahun 2025

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang Tahun 2025, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
- 2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.

Sebelum menyusun Rencana Kerja Tahun 2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan juga tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2022. Evaluasi Rencana Kerja OPD memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana Kerja OPD Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dan Pencapaian Perencanaan Strategisnya, dapat dilihat pada tabel di bawah :

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 (SEMESTER IV)
 OPD DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN KOTA TANJUNGPINANG

No	Kode	Uraian/ Bidang Urusan Pemerintahan/ Organisasi Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi				Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD P yang Dievaluasi	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD P yang Dievaluasi (%)	Keterangan	Permasalahan di Masing-Masing Indikator	Upaya Mengatasi Permasalahan
					RKPD		APBD		RKPD Perubahan		APBD Perubahan		I		II		III		IV						
					K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
		DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN			17.321.890.239		13.427.230.313		13.427.230.313		14.394.479.504		1.801.335.818		3.845.284.756		5.545.136.950		2.515.771.673		13.707.529.197	87,50	95,23		
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN DASAR			11.380.031.587		10.752.945.769		10.752.945.769		11.045.643.051		1.801.335.818		3.159.021.071		4.309.634.040		1.298.512.232		10.568.503.161	100,00	95,68		
2.09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			11.380.031.587		10.752.945.769		10.752.945.769		11.045.643.051		1.801.335.818		3.159.021.071		4.309.634.040		1.298.512.232		10.568.503.161	100,00	95,68		
2.09.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA			10.151.031.587		10.257.630.369		10.257.630.369		10.417.001.651		1.801.335.818		3.066.230.671		4.129.758.040		1.039.796.904		10.037.121.433	100,00	96,35		
209012.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			74.000.000		28.000.000		28.000.000		28.000.000		-		7.962.500		11.035.500		7.024.000		26.022.000				
209012.0101		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	39.000.000	3	14.000.000	3	14.000.000	3	14.000.000	0	-	3	5.690.000		5.665.500		1.429.000	3	12.784.500	100	91,32	
209012.0102		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	35.000.000	3	14.000.000	3	14.000.000	3	14.000.000	0	-	3	2.272.500		5.370.000		5.995.000	3	13.237.500	100,00	94,55	
209012.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.619.390.627		6.773.373.809		6.773.373.809		6.892.348.587		1.462.390.380		2.205.051.977		2.947.546.262		55.402.268		6.670.390.887				
209012.0201		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.619.390.627	564	6.773.373.809	564	6.773.373.809	564	6.892.348.587	141	1.462.390.380	141	2.205.051.977	141	2.947.546.262	141	55.402.268	564	6.670.390.887	100	96,78		
209012.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			511.840.000		726.571.400		726.571.400		693.444.400		13.332.740		136.961.867		248.605.154		250.853.661		649.753.422				
209012.0601		Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Perencanaan Bangunan	Paket	1	25.000.000	1	10.604.000	1	10.604.000	1	10.604.000	0	-	0	-	1	10.237.310		340.690	1	10.578.000	100	99,75	
209012.0603		Persediaan Perawatan Rumah	Jumlah Paket Perawatan Rumah	Paket	1	30.000.000	1	26.499.400	1	26.499.400	1	26.499.400	0	-	1	3.377.175		9.740.000		13.357.500	1	26.474.675	100,00	99,91	
209012.0604		Persediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Paket	5	75.000.000	5	120.835.000	5	120.835.000	5	129.457.000	0	-	5	56.713.500		34.433.000		37.310.000	5	128.456.500	100,00	99,23	
209012.0605		Persediaan Barang Cetak dan Perencanaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Perencanaan	Paket	2	61.840.000	2	60.122.000	2	60.122.000	2	60.122.000	2	2.997.000	0	17.186.130		19.485.000		20.095.000	2	59.763.130	100,00	99,40	
209012.0607		Persediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Diperlukan	Paket	2	40.000.000	2	11.886.000	2	11.886.000	2	7.500.000	2	1.500.000	0	600.000		3.000.000		2.400.000	2	7.500.000	100,00	100,00	
209012.0609		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	180.000.000	12	341.625.000	12	341.625.000	12	304.262.000	3	8.835.740	3	59.085.062	3	117.042.344	3	77.561.471	12	262.524.617	100,00	86,28	
209012.0611		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	1	100.000.000	2	155.000.000	2	155.000.000	2	155.000.000	0	-	0	-		54.667.500	2	99.789.000	2	154.456.500	100,00	99,65	
209012.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			391.000.000		351.492.200		351.492.200		393.089.600		-		147.390.000		196.000.000		39.860.000		383.250.000				
209012.0705		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Diperlukan	Unit	12	40.000.000	10	42.948.700	10	42.948.700	10	42.948.700	0	-	10	41.890.000		-		10	41.890.000	100	97,53		
209012.0706		Pengadaan Perlengkapan dan Mesin Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan dan Mesin Kantor yang Diperlukan	Unit	12	351.000.000	27	308.543.500	27	308.543.500	27	390.140.900	0	-	27	105.500.000		196.000.000		39.860.000	27	341.360.000	100,00	97,49	
209012.08		Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.680.175.960		1.742.738.960		1.742.738.960		1.728.535.054		264.578.741		391.196.196		445.743.442		527.409.515		1.628.947.884				
209012.0802		Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Diperlukan	Laporan	12	207.285.000	12	164.328.700	12	164.328.700	12	164.301.200	3	36.734.597	3	20.339.306	3	45.574.559	3	49.639.317	12	152.287.779	100	92,69	
209012.0804		Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Diperlukan	Laporan	70	1.472.890.960	12	1.578.410.260	12	1.578.410.260	12	1.564.253.864	3	227.844.144	3	370.846.880	3	400.168.883	3	477.800.198	12	1.476.660.105	100,00	94,40	
209012.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			874.625.000		635.454.000		635.454.000		681.564.000		61.033.957		177.676.141		280.827.682		139.217.460		678.737.240				
209012.0901		Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Paket Pemeliharaan Perawatan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pemerintah	Jumlah Laporan Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Paket Pemeliharaan Perawatan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pemerintah	Unit	20	570.000.000	24	423.596.000	24	423.596.000	24	449.252.000	0	56.978.957	20	150.618.981		121.868.072	4	118.431.941	24	447.897.951	100	99,70	
209012.0906		Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Kantor	Jumlah Perawatan dan Mesin Kantor yang Diperlukan	Unit	0	64.625.000	44	41.190.000	44	41.190.000	44	46.680.000		4.055.000	44	27.059.160		3.900.000	0	11.078.850	44	46.093.010	100,00	98,74	
209012.0909		Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Diperlukan Rehabilitasi	Unit	1	190.000.000	1	155.784.000	1	155.784.000	1	155.784.000	0	-	0	-	1	155.059.610	0	-	1	155.059.610	100,00	99,54	
209012.0910		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diperlukan Rehabilitasi	Unit	3	50.000.000	1	14.924.000	1	14.924.000	1	29.848.000	0	-	0	-		-	1	29.706.669	1	29.706.669	100,00	99,53	
2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			1.029.000.000		443.531.400		443.531.400		584.341.400		-		59.790.400		177.876.000		230.915.328		498.581.728	100,00	83,61		
2090302.01		Pemantauan dan Penyuluhan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Daerah			25.000.000		49.983.800		49.983.800		234.833.800				49.164.800				178.570.000		227.734.800				
2090302.0104		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	20	25.000.000	1	49.983.800	1	49.983.800	1	234.833.800	0	-	1	49.164.800		-		178.570.000	1	227.734.800	100	96,98	
2090302.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Beras/Kebutuhan Gizi			150.000.000		123.621.000		123.621.000		89.121.000		-		-		-		7.411.000		7.411.000				
2090302.0203		Pengelolaan Cadangan Pangan Beras/Kebutuhan Gizi	Jumlah Cadangan Pangan Beras/Kebutuhan Gizi	Ton	10	150.000.000	10	123.621.000	10	123.621.000	10	89.121.000	0	-	0	-	-	-	10	7.411.000	10	7.411.000	100	8	
2090302.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			854.000.000		269.926.600		269.926.600		260.386.600				10.625.600		177.876.000		64.934.328		253.435.928				

No	Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan Pemertihan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Diakuisi				Target Kinerja dan Anggaran RKPD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Diakuisi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD P yang Diakuisi	Pemerataan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD P yang Diakuisi (%)	Keterangan	Permasalahan di Masing-Masing Indikator	Upaya Penanganan Permasalahan						
					RKPD		APBD		RKPD Perubahan		APBD Perubahan		I		II							III		IV			
					K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn	K	Rn						K	Rn	K	Rn		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13 / 8 * 100	15	16	17										
20032.0402		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengkaderan Koperasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengkaderan Koperasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	4	654.000.000	4	269.926.600	4	269.926.600	4	260.386.600	0	-	1	10.625.600	2	177.876.000	1	64.934.328	4	253.435.928	100	97,33			
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100,00	97,33											
														Predikat Kinerja Kegiatan	ST												
2 09 05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN BAHAN				200.000.000		51.784.000		51.784.000		44.300.000		-		33.000.000		2.000.000		7.800.000		42.800.000	100,00	96,61			
209052,01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Sagar Daerah Kabupaten/Kota				200.000.000		51.784.000		51.784.000		44.300.000		-		33.000.000		2.000.000		7.800.000		42.800.000	100,00	96,61			
209052,0104		Rakomendasi Keamanan Pangan Sagar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rakomendasi Keamanan Pangan Sagar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	200.000.000	10	51.784.000	10	51.784.000	10	44.300.000	0	-	3	33.000.000	4	2.000.000	3	7.800.000	10	42.800.000	100	96,61			
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100,00	96,61											
														Predikat Kinerja Kegiatan	ST												
3		URUSAN PEMERINTAHAN				5.941.858.652		2.674.284.544		2.674.284.544		3.348.836.533		-		686.263.685		1.235.502.910		1.212.259.441		3.139.026.036	75,00	93,73			
3 25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.540.000.000		539.361.000		539.361.000		1.060.619.000		-		-		512.298.600		516.175.780		1.028.474.380	50,00	96,97			
3 25 04		PROGRAM PENGENDALIAN PERIKANAN/BIODIVERSITAS				1.540.000.000		539.361.000		539.361.000		1.060.619.000		-		-		512.298.600		516.175.780		1.028.474.380	100,00	96,97			
325042,04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				1.540.000.000		539.361.000		539.361.000		1.060.619.000		-		-		512.298.600		516.175.780		1.028.474.380	100,00	96,97			
325042,0402		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	13	570.000.000	300	162.747.000	300	162.747.000	300	321.605.000	0	-	0	-	300	150.225.000		167920380	300	318.145.380	100	98,92			
325042,0403		Pengembangan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	13	970.000.000	40	376.614.000	40	376.614.000	40	739.014.000	0	-	0	-	40	362.073.600		349255400	40	710.329.000	100	96,12			
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100,00	96,97											
														Predikat Kinerja Kegiatan	ST												
3 27 02		PROGRAM PENYEDIAN DAN PENGEMBANGAN SARANA BERTANIAN				1.489.535.800		505.983.300		505.983.300		577.143.300		-		382.107.150		150.446.460		17.183.000		549.736.610	100,00	95,25			
327022,02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewanengann Kabupaten/Kota				889.535.800		500.585.300		500.585.300		500.585.300		-		382.107.150		93.666.460		8.606.000		484.379.610	100,00	95,25			
327022,0201		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewanengann Kabupaten/Kota				889.535.800		500.585.300		500.585.300		500.585.300		-		382.107.150		93.666.460		8.606.000		484.379.610	100,00	95,25			
327022,0201		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewanengann Kabupaten/Kota	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestaran dan Diseminasi	VLB	4	889.535.800	4	500.585.300	4	500.585.300	3	500.585.300	0	-	2	382.107.150	1	93.666.460		8.606.000	3	484.379.610	100	96,76			
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100,00	96,76											
														Predikat Kinerja Kegiatan	ST												
327022,06		Pengelolaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				600.000.000		95.398.000		95.398.000		76.558.000		-		-		56.780.000		8.577.000		65.357.000	100,00	95,37			
327022,0601		Pengelolaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Bak	540	600.000.000	360	95.398.000	360	95.398.000	360	76.558.000	0	-	0	-	360	56.780.000		8.577.000	360	65.357.000	100	95,37			
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100,00	95,37											
														Predikat Kinerja Kegiatan	ST												
3 27 03		PROGRAM PENYEDIAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA BERTANIAN				1.229.985.600		398.869.765		398.869.765		339.651.282		-		21.307.435		55.235.550		257.279.268		333.822.253	100,00	98,28			
327032,02		Pembangunan Prasarana Pertanian				1.229.985.600		398.869.765		398.869.765		339.651.282		-		21.307.435		55.235.550		257.279.268		333.822.253	100,00	98,28			
327032,0207		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Dinhabilitasi dan Diawabahi	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Dinhabilitasi dan Diawabahi	Unit	1	200.000.000	1	73.557.097	1	73.557.097	1	30.028.964	0	-	1	6.660.000		7.804.000		12.876.940	1	27.340.940	100	91,05			
327032,0309		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Dinhabilitasi dan Diawabahi	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Dinhabilitasi dan Diawabahi	Unit	1	1.029.985.600	2	325.312.668	2	325.312.668	2	309.622.318	0	-	1	14.647.435	1	47.431.550		244.402.328	2	306.481.313	100,00	98,99			
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100,00	98,28											
														Predikat Kinerja Kegiatan	ST												
3 27 04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT SETERMINA				415.000.000		349.241.479		349.241.479		277.896.951		-		25.589.100		146.750.985		45.497.823		217.837.886	100,00	92,28			
327042,01		Pengendalian Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Ditinjau dari Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-		-		-		-		-	-	-			
327042,0101		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Laporan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100,00	92,28											
														Predikat Kinerja Kegiatan	ST												
327042,03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				265.000.000		222.814.790		222.814.790		207.592.262		-		25.589.100		94.171.465		36.895.793		156.656.358	100	75,46			
327042,0302		Pelayanan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	164	265.000.000	164	222.814.790	164	222.814.790	164	207.592.262	0	-	82	25.589.100	20	94.171.465	82	36.895.793	164	156.656.358	100,00	75,46			
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100,00	75,46											
														Predikat Kinerja Kegiatan	ST												
327042,04		Penerapan dan Pengawasan Penyerasan Teknik Kesehatan Masyarakat Veteriner				150.000.000		126.426.689		126.426.689		70.304.689		-		-		52.579.500		8.602.030		61.181.530	100	87,02			
327042,0402		Pengawasan Penerapan Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Penerapan Hewan dan Produk Hewan	Laporan	12	150.000.000	12	126.426.689	12	126.426.689	12	70.304.689	0	-	0	-	12	52.579.500		8.602.030	12	61.181.530	100	87,02			
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100,00	87,02											
														Predikat Kinerja Kegiatan	ST												
3 27 07		PROGRAM PENYULUHAN BERKELANJUTAN				1.267.337.252		790.829.000		790.829.000		1.093.526.000		-		257.260.000		370.771.305		381.123.570		1.009.154.905	100,00	92,28			
327072,01		Pelaksanaan Penyuluhan Berkelanjutan				1.267.337.252		790.829.000		790.829.000		1.093.526.000		-		257.260.000		370.771.305		381.123.570		1.009.154.905	100,00	92,28			
327072,0102		Pengembangan Kapasitas Masyarakat Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditentukan di Kecamatan	Jumlah Masyarakat Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditentukan di Kecamatan	Unit	21	998.163.300	46	250.275.000	46	250.275.000	46	262.560.000	0	-	10	11.020.000	36	118.029.335		64.161.070	46	193.210.405	100	73,59			
327072,0105		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	6	369.173.952	3	530.554.000	3	530.554.000	3	830.966.000	0	-	2	246.240.000	1	252.742.000		316.962.500	3	815.944.500	100,00	96,19			
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan	100,00	92,28											
														Predikat Kinerja Kegiatan	ST												
JUMLAH ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										14.394.479.584		JUMLAH REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										13.707.529.197		87,50		95,23	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																											

No	Kode	Urutan/ Bidang Urutan Pemerintah Daerah/ dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan Indikator	Target Kinerja dan Anggaran RPMD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Target Kinerja dan Anggaran RPMD dan APBD Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD P yang Dievaluasi	Persentase Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RPMD P yang Dievaluasi (%)	Keterangan	Permasalahan di Masing-Masing Indikator	Upaya Mengatasi Permasalahan
					RPMD	APBD	RPMD Perubahan	APBD Perubahan	I	II	III	IV					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 9 + 10 + 11 + 12	14 = 13 / 8 * 100	15	16	17
					K Rn	K Rn	K Rn	K Rn	K Rn	K Rn	K Rn	K Rn	K Rn	K Rn			
PREDIKAT KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM														T	ST		

D

TANJUNGPINANG, JANUARI 2024
KEPALA DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN


YONLEABRI
Pembina TK I
NIP. 19700503 200312 1 006

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kajian Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sebagai berikut :

No.	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Realisasi Capaian	Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan (%)	59,7	60	62	64	66	68	67,99	73
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	84,6	92	92	94	94	95	91,10	93
3	Ketersediaan Pangan Utama (%)	80,13	95	96	97	98	99	80,43	90
4	Angka Kecukupan Energi ketersediaan (kg/kap/th)	1.713	2.300	2.310	2.320	2.330	2.340	2.387	2.390
5	Angka Kecukupan Protein Ketersediaan (Kg/Kap/th)	45,37	57	58	59	60	61	61,10	61
6	Angka Kecukupan Energi Konsumsi (Kg/Kap/th)	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2121	2.100
7	Angka Kecukupan Protein konsumsi (Kg/Kap/th)	73,2	74	74	74	74	74	70	74
8	Persentase maksimum koefisien harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen (%)	2,69	<10	<10	<10	<10	<10	3,5	<15

No.	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Realisasi Capaian	Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Persentase Produk Pangan Asal Hewan yang Aman dan Sehat (%).	63,87	78,46	81,46	84,46	87,46	90,46	65	77
10	Persentase produk pangan segar asal tumbuhan yang aman (%).	80	90	90	90	95	95	100	90
11	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.947	2.800	3.000	3.300	3.500	3.700	4385,24	3.600
12	Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)	43,3	43,3	43,5	43,7	43,9	44	49,84	
13	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	5	10	10	10	10	11	50	20
14	Nilai Ekspor Perikanan	18,75	18,88	19,01	19,14	19,28	19,41	7,05	-
15	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	80,22	95	115	130	140	150	182,57	175
16	Persentase pembudidayaan ikan menerapkan CBIB	57,00	60,00	65,00	70,00	80,00	90,00	80	80,00
17	Jumlah produksi tanaman palawija	505	515	525	535	545	560	250,45	180
18	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	1.158	1.125	1.150	1.175	1.200	1.225	1.352,82	1.230
19	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	76	100	101	105	107	109	85,35	50

No	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Realisasi Capaian	Proyeksi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Cakupan Bina Kelompok (%)	85	90	95	100	100	100	100	100
21	Jumlah Produksi Peternakan (Ton)	2.722	2.858	3.000	3.150	3.307	3.472	3.457,19	3.500
22	Populasi Ternak	296.740	311.567	327.154	343.512	360.687	378.721	293.227	
23	Tingkat Kematian Ternak	3,7	3,5	3	2,5	2	2	2,4	2
24	Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	16	2	2	2	2	2	2,56	2
25	Nilai Jual Hasil Produk Peternakan Kelompok Ternak Binaan.	16.911.500	17.216.700	17.522.000	17.926.300	18.129.500	18.329.600	28.57	20,50

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menjalankan urusan pemerintah pada Urusan Wajib yang tidak pelayanan dasar yaitu Urusan Pangan dan Urusan Pilihan pada Urusan Perikanan dan Pertanian. Dalam pelaksanaan urusan tersebut perlu adanya analisis lingkungan yang merupakan peluang dan tantangan di Lingkungan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam upaya mencapai sasaran-sasaran strategis Kota Tanjungpinang. Tantangan dan Peluang yang teridentifikasi sebagai berikut :

a. Tantangan

Tantangan merupakan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan

Pengembangan Pelayanan Dinas Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

Urusan Pangan :

- a. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya menjadi tantangan dalam penyediaan pangan, yang sangat ditentukan oleh produksi pangan lokal dan pasokan pangan dari luar daerah.
- b. Rendahnya produksi pangan lokal dan tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah sangat berpengaruh pada stabilitas harga pangan sehingga distribusi dan pemantauan harga pangan menjadi hal yang prioritas.
- c. Pemahaman terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih rendah yang dipengaruhi adat dan tradisi serta kebiasaan makan.
- d. Penggunaan pestisida, bahan kimia dan bahan tambahan pangan yang cenderung meningkat pada pangan terutama komoditas import segar segar dan kurangnya pemahaman terhadap produk pangan hewani yang higinis memerlukan pengawasan terhadap mutu dan keamanan pangan yang beredar.
- e. Tingginya permintaan daging sedangkan harga daging segar di tanjungpinang cukup mahal, sehingga menjadi potensi pemasukan illegal yang harganya lebih murah. Sebagai daerah pemasaran terhadap komoditi pertanian dan peternakan yang diproduksi oleh daerah tetangga (Bintan dan Batam) sedangkan tidak terdapat *check point* sehingga pengawasan lalulintas belum optimal yang berisiko masuk dan menyebarnya penyakit melalui media pembawa.
- f. Belum adanya regulasi terkait pengaturan teknis lalulintas komoditi dari maupun ke wilayah Kota Tanjungpinang.

Urusan Pertanian

- a. Ketersediaan lahan cenderung terus menurun karena alih fungsi lahan untuk perluasan perumahan, perdagangan dan sektor-sektor lainnya dan ditambah ketidakjelasan status kepemilikan lahan yang tersedia.

- b. Ancaman perubahan iklim global yang berdampak pada perubahan pola cuaca dan intensitas curah hujan, yang menyebabkan bergesernya pola tanam dan rentannya muncul hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian.
- c. Lokasi pertanian terpencar dengan luasan lahan budidaya yang relatif kecil, sehingga menjadi kurang efisien yang mengakibatkan biaya produksi menjadi tinggi.
- d. Kelembagaan tani yang masih lemah dalam kemitraan usaha, pemodalan dan pemanfaatan peluang pasar.
- e. Pola pikir dan perilaku petani yang masih berorientasi pada aspek produksi tanpa memperhatikan mutu, sehingga harga yang diterima petani relatif rendah.
- f. Berkurangnya minat tenaga muda di sektor pertanian, yang cenderung lebih memilih bekerja pada sektor industri dan sektor lainnya.
- g. Belum adanya regulasi daerah yang menaungi RDTR dan perizinan usaha lingkup peternakan dan kesehatan hewan sehingga kurang mendukung iklim investasi berusaha dalam sektor hulu dan pasca panen peternakan.

Urusan Perikanan

- a. Lemahnya pemodalan dalam menunjang usaha perikanan terutama usaha kecil dan menengah.
- b. Kuota BBM bersubsidi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan masih terbatas.
- c. Pengelolaan pemasaran dan teknologi pengolahan perikanan yang belum memadai.
- d. Peningkatan alih fungsi lahan potensial budidaya perikanan ke kegiatan non sektor perikanan.
- e. Masih lemahnya kelembagaan kelompok nelayan dan rendahnya kualitas sumber daya pelaku usaha sektor perikanan.

b. Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

Urusan Pangan :

- a. Tersedianya lahan pekarangan dan belum dikelola secara optimal untuk penganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal;
- b. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui dana APBN pada dana Tugas Pembantuan serta dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi.

Urusan Pertanian :

- a. Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha.
- b. Perkembangan teknologi pertanian, perkebunan dan peternakan yang semakin baik memberikan peluang dalam pengembangan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan.
- c. Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan pertanian dan perikanan melalui APBN pada Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan serta dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi.
- d. Meningkatkan permintaan pasar terhadap produk-produk pertanian.

Urusan Perikanan

- a. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang belum termanfaatkan secara optimal. Dan Letak yang strategis Kota Tanjungpinang sangat menguntungkan untuk pemasaran produksi perikanan.
- b. Tingginya permintaan ikan untuk memenuhi pasar lokal dan dan luar negeri, yang mana perikanan memiliki potensi sebagai salah satu sektor unggulan.
- c. Tingginya permintaan ikan untuk memenuhi pasar lokal dan dan luar negeri, yang mana perikanan memiliki potensi sebagai salah satu sektor unggulan.
- d. Adanya kebijakan dan dukungan pemerintah untuk pengembangan usaha perikanan dengan memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil.

- e. Peluang investasi pada bidang pengolahan dan pemasaran produk perikanan dengan keunggulan jenis dan kualitas produk.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rancana Kerja yang berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2024-2026 untuk tercapainya sasaran dan tujuan yang ditetapkan. Pengusulan kegiatan juga memperhatikan usulan dari masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Kota. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan bersifat partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, terutama untuk mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sasaran RPD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan dan memperhatikan Kebijakan Nasional yang tertuang dalam bentuk Program Prioritas Nasional untuk mendukung tercapainya Pembangunan Nasional Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran OPD

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahunan. Tujuan OPD merupakan wujud dari sasaran yang akan dicapai pada RPD. Sasaran dalam RPD adalah Meningkatnya Produksi Perikanan dan Terwujudnya Ketahanan Pangan. Sasaran ini dalam rangka mewujudkan tujuan RPD untuk tercapainya Visi Kota Tanjungpinang, yaitu : “Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani”. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan berperan pada unsur visi untuk mewujudkan “Kota yang Maju dan Sejahtera”

Dari Sasaran RPD tersebut, tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Ketahanan Pangan
2. Meningkatkan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang

diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Perangkat Daerah
2. Meningkatnya Ketersediaan Pangan
3. Meningkatnya Konsumsi dan Keamanan Pangan
4. Meningkatnya Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan
5. Meningkatnya produksi Komoditi Pertanian Lokal
6. Meningkatnya produksi Komoditi Peternakan Lokal
7. Meningkatnya produksi Perikanan

3.3. Program dan Kegiatan

Dengan adanya tujuan dan sasaran maka dijabarkan program dan kegiatan yang merupakan upaya yang akan ditempuh untuk mencapai Pembangunan sebagaimana RPD 2024-2026.

Dalam implementasinya agar program dan kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi maka masing – masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Matriks Rencana Kerja tersebut berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2024-2026, dengan memperhatikan program, kegiatan, indikator, target dan pagu indikatif pada Rencana Kerja Tahun 2025.

Matrik Rencana Kerja Tahun 2025 sebagaimana berikut :

diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya ketersediaan pangan.
2. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan.
3. Meningkatnya produktivitas pertanian dan peternakan.
4. Meningkatnya produktivitas perikanan.
5. Meningkatnya daya saing produksi perikanan.

3.2. Program dan Kegiatan

Dengan adanya tujuan dan sasaran maka dijabarkan program dan kegiatan yang merupakan upaya yang akan ditempuh untuk mencapai Pembangunan sebagaimana RPD 2024-2026

Dalam implementasinya agar program dan kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi maka masing – masing program diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Matriks Rencana Kerja tersebut berpedoman pada Renstra OPD Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan program, kegiatan, indikator, target dan pagu indikatif pada Rencana Kerja Tahun 2025

Matrik Rencana Kerja Tahun 2025 sebagaimana berikut :

**Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026**

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Kemandagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	11	12	9	10	11	12
DP3							Rp 13.347.000.000				Rp 13.617.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai		60					
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						Rp 12.397.000.000				Rp 12.277.000.000
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	nilai	Tanjungpinang	75	Rp 11.952.000.000			75	Rp 11.802.000.000
2.09.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	Tanjungpinang	100	Rp 7.100.000.000			100	Rp 7.200.000.000
2.09.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	Tanjungpinang	60	Rp 7.100.000.000	APBD Kota		65	Rp 7.200.000.000
2.09.01.2.05	Kegiatan Admiistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Admiistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	Tanjungpinang	100	Rp 50.000.000			100	Rp 50.000.000
2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	Tanjungpinang	1	Rp 50.000.000	APBD Kota		1	Rp 50.000.000
2.9.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	Tanjungpinang	90	Rp 80.000.000			90	Rp 80.000.000
2.09.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Per	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tanjungpinang	5	Rp 40.000.000	APBD Kota		5	Rp 40.000.000
2.09.01.2.01.0007	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Tanjungpinang	4	Rp 40.000.000	APBD Kota		4	Rp 40.000.000
2.09.01.2.06	Kegiatan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah.	Kegiatan Adminsitrasi Umum Perangkat Daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	%	Tanjungpinang	100	Rp 800.000.000			100	Rp 800.000.000
2.09.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan / Komponen Instalasi Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan / Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	1	Rp 15.000.000	APBD Kota		1	Rp 15.000.000
2.09.01.2.06.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	5	Rp 75.000.000	APBD Kota		5	Rp 75.000.000
2.09.01.2.06.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	1	Rp 50.000.000	APBD Kota		1	Rp 50.000.000
2.09.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	5	Rp 100.000.000	APBD Kota		5	Rp 100.000.000
2.09.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	2	Rp 70.000.000	APBD Kota		2	Rp 70.000.000
2.09.01.2.06.0007	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material.	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	Tanjungpinang	1	Rp 15.000.000	APBD Kota		1	Rp 15.000.000
2.09.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	Tanjungpinang	12	Rp 375.000.000	APBD Kota		12	Rp 375.000.000
2.09.01.2.06.0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerint	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Tanjungpinang	1	Rp 100.000.000	APBD Kota		1	Rp 100.000.000

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Kependagtri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	11	12	9	10	11	12
2.09.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik	%	Tanjungpinang	100	Rp 925.000.000			100	Rp 825.000.000
2.09.01.2.07.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	Tanjungpinang	2	Rp 500.000.000	APBD Kota		6	Rp 400.000.000
2.09.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Tanjungpinang	15	Rp 50.000.000	APBD Kota		15	Rp 50.000.000
2.09.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	Tanjungpinang	29	Rp 375.000.000	APBD Kota		29	Rp 375.000.000
2.09.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	Tanjungpinang	100	Rp 1.900.000.000			100	Rp 1.900.000.000
2.09.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	Tanjungpinang	12	Rp 200.000.000	APBD Kota		12	Rp 200.000.000
2.09.01.2.08.0003	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	Tanjungpinang	12	Rp 100.000.000	APBD Kota		12	Rp 100.000.000
2.09.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	Tanjungpinang	12	Rp 1.600.000.000	APBD Kota		12	Rp 1.600.000.000
2.09.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara dengan baik	%	Tanjungpinang	100	Rp 947.000.000			100	Rp 947.000.000
2.09.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	Tanjungpinang	24	Rp 570.000.000	APBD Kota		24	Rp 570.000.000
2.09.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	Tanjungpinang	50	Rp 60.000.000	APBD Kota		50	Rp 60.000.000
2.09.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	Tanjungpinang	1	Rp 100.000.000	APBD Kota		1	Rp 100.000.000
2.09.01.2.09.0010	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	Tanjungpinang	1	Rp 150.000.000	APBD Kota		1	Rp 150.000.000
2.09.01.2.09.0008	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Bulan	Tanjungpinang	1	Rp 67.000.000	APBD Kota		1	Rp 67.000.000
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANIKAN						Rp 445.000.000				Rp 475.000.000
2.09.03.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT.	Skor PPH	%	Tanjungpinang	73	Rp 210.000.000			73	Rp 220.000.000
2.09.03.2.01.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	%	Tanjungpinang	100	Rp 100.000.000			100	Rp 105.000.000
2.09.03.2.01.01.0003	Sub Kegiatan Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Sub Kegiatan Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi Sikronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	laporan	Tanjungpinang	1	Rp 20.000.000			1	Rp 25.000.000
2.09.03.2.01.01.0011	Sub Kegiatan Pemantaun Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Sub Kegiatan Pemantaun Stok Pangan	Informasi stok pangan	Dokumen	Tanjungpinang	1	Rp -			1	Rp -
2.09.03.2.01.01.0015		Sub Kegiatan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	Tanjungpinang	1	Rp 50.000.000	APBD Kota		1	Rp 50.000.000

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	11	12	9	10	11	12
2.09.03.2.01.01.0012	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten Kota	Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten Kota	laporan	Tanjungpinang	1	Rp 15.000.000	APBD Kota		1	Rp 15.000.000
2.09.03.2.01.01.0013		Sub Kegiatan Penyusunan Prognosa Neraca Bahan Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	laporan	Tanjungpinang	1	Rp 15.000.000	APBD Kota		1	Rp 15.000.000
2.09.03.2.02.	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota.	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota.	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	%	Tanjungpinang	100	Rp 70.000.000			100	Rp 75.000.000
2.09.03.2.02.03.	Sub Kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota.	Sub Kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten / Kota.	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	Tanjungpinang	10	Rp 70.000.000	APBD Kota		10	Rp 75.000.000
2.09.03.2.04.	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan angka kecukupan gizi	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan angka kecukupan gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	%	Tanjungpinang	100	Rp 40.000.000			100	Rp 40.000.000
2.09.03.2.04.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	Tanjungpinang	1	Rp 40.000.000	APBD Kota		1	Rp 40.000.000
2.09.04.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN.	Persentase Penurunan kelurahan Rentan Pangan	%	Tanjungpinang	10	Rp 105.000.000	APBD		10	Rp 115.000.000
2.09.04.2.01.	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.	Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan.	Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	%	Tanjungpinang	10	Rp 105.000.000	APBD Kota		10	Rp 115.000.000
2.09.04.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.	Sub Kegiatan Penyusunan Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan.	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	Tanjungpinang	1	Rp 105.000.000	APBD Kota		1	Rp 115.000.000
2.09.05.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN.	Persentase Keamanan dan Mutu Pangan	%	Tanjungpinang	85	Rp 130.000.000	APBD		85	Rp 140.000.000
2.09.05.2.01.	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota.	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota.	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Segar Daerah Kabupaten/Kota	%	Tanjungpinang	85	Rp 130.000.000			85	Rp 140.000.000
2.09.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota.	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Tanjungpinang	1	Rp 50.000.000	APBD Kota		1	Rp 60.000.000
2.09.05.2.01.0006	Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Rekomendasi Perizinan Keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	Tanjungpinang	1	Rp 30.000.000			1	Rp 30.000.000
2.09.05.2.01.01	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan dan Mutu pangan segar asal tumbuhan	Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen	Tanjungpinang	1	Rp 50.000.000			1	Rp 50.000.000
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN.					Rp 390.000.000				Rp 420.000.000
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Ini	Ton	Tanjungpinang	3600	Rp 130.000.000			3650	Rp 140.000.000
3.25.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.	Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota.	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	unit	Tanjungpinang	8	Rp 25.000.000			10	Rp 25.000.000
		0									
3.25.03.2.01.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap.	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit	Tanjungpinang	8	Rp 25.000.000	APBD Kota		10	Rp 25.000.000

Kode (Mengacu Kepmen 060)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	11	12	9	10	11	12
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap.	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	Tanjungpinang			APBD Kota			Rp -
3.25.03.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	Persentase Jumlah Nelayan, Kelompok Nelayan dan Unit usaha yang terbina	%	Tanjungpinang	6,5	Rp 105.000.000			7	Rp 115.000.000
3.25.03.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil.	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	Tanjungpinang	100	Rp 70.000.000	APBD Kota		100	Rp 80.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	Tanjungpinang	45	Rp 15.000.000			50	Rp 15.000.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	unit usaha	Tanjungpinang	1200	Rp 20.000.000			1300	Rp 20.000.000
3.25.04.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	Tanjungpinang	175	Rp 130.000.000			190	Rp 140.000.000
3.25.04.2.02.	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil.	Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil.	Jumlah Kelompok Pembudidaya ikan yang terbina	Kelompok	Tanjungpinang	10	Rp 10.000.000			10	Rp 20.000.000
3.25.04.2.02.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	Kelompok	Tanjungpinang	10	10.000.000			10	20.000.000
3.25.04.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan kecil	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Kecil yang mengikuti Pembentukan dan Pengembangan	Kelompok	Tanjungpinang	15				15	
3.25.04.2.02.04	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.	Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	Tanjungpinang	5		APBD Kota		5	
3.25.04.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi Bantuan pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan	Kelompok	Tanjungpinang	5				5	
3.25.04.2.04.	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan.	Jumlah sarana prasarana dan Pembudidaya ikan	Orang	Tanjungpinang	150	Rp 120.000.000			150	Rp 120.000.000
3.25.04.2.04.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Tanjungpinang	1				1	
3.25.04.2.04.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	Tanjungpinang	4	50.000.000			4	50.000.000
3.25.04.2.04.0009	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	unit	Tanjungpinang	15	70.000.000			15	70.000.000
3.25.04.2.04.04	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui	Dokumen	Tanjungpinang	1					
3.25.04.2.04.05	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan	Orang	Tanjungpinang	150					
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN.	Jumlah Produksi Hasil Pengolahan	ton	Tanjungpinang	297,84	Rp 130.000.000			312,73	Rp 140.000.000
3.25.06.2.02.	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.	Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil.	Jumlah Produksi Hasil Pengolahan	unit usaha	Tanjungpinang	20	Rp 45.000.000			20	Rp 50.000.000

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	11	12	9	10	11	12
3.25.06.2.02.01	Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Sub Kegiatan pembinaan terhadap penerapan persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah unit usaha	Tanjungpinang	20	Rp 45.000.000	APBD Kota		20	Rp 50.000.000
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten Kota	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Kabupaten Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	pelaku usaha	Tanjungpinang	100	Rp 85.000.000			110	Rp 90.000.000
	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro kecil dalam 1 (satu) daerah kab/kota yang terfasilitasi	pelaku usaha	Tanjungpinang	100	Rp 85.000.000			110	Rp 90.000.000
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN.					Rp 560.000.000				Rp 770.000.000
3.27.02.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan sarana pertanian	%	Tanjungpinang	94	Rp 130.000.000	Rp -	Rp -	96	Rp 160.000.000
			Persentase peningkatan sarana peternakan	%	Tanjungpinang	10				10	
3.27.02.2.01	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan	kali	Tanjungpinang	12				12	Rp -
3.27.02.2.01.1.0001	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	laporan	Tanjungpinang	1				1	Rp -
3.27.02.2.01.1.0002	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	Tanjungpinang	1				1	Rp -
3.27.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota.	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten / Kota.	Jumlah SDG yang terkelola.	vub	Tanjungpinang	2	Rp 70.000.000			2	Rp 80.000.000
3.27.02.2.02.0004	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	vub	Tanjungpinang	1	Rp 25.000.000	APBD Kota		2	Rp 25.000.000
3.27.02.2.02.0005		Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG Hewan yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian			1	Rp 25.000.000				Rp 25.000.000
3.27.02.2.02.0002		Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	Tanjungpinang	2	Rp 20.000.000			2	Rp 30.000.000
3.27.02.2.03	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan dalam Daerah Kabupaten Kota	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan dalam Daerah Kabupaten Kota			Tanjungpinang	3	Rp -	APBD Kota		3	Rp 20.000.000
	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak/Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	laporan	Tanjungpinang	2				2	Rp -
	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang beredar	laporan	Tanjungpinang	1				1	Rp 20.000.000
3.27.02.2.05	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				2	Rp -			2	Rp -
	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	laporan	Tanjungpinang	1				1	Rp -

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Kependagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	11	12	9	10	11	12
3.27.02.2.06.	Kegiatan Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah di Kabupaten / Kota Lain.	Kegiatan Penyediaan Benih / Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah di Kabupaten / Kota Lain.	Rasio Ketersediaan dan Kebutuhan Sarana Produksi Peternakan.	%	Tanjungpinang	15	Rp 40.000.000			17	Rp 60.000.000
3.27.02.2.06.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain.	Sub Kegiatan Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten / Kota Lain.	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	ton	Tanjungpinang	40		APBD Kota		1	Rp 20.000.000
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Benih /bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ekor	Tanjungpinang	500	Rp 40.000.000	APBD Kota		520	Rp 40.000.000
3.27.03.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN.	Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian	%	Tanjungpinang	85	Rp 130.000.000			85	Rp 180.000.000
			Tingkat Kemanfaatan Spras Peternakan.	%	Tanjungpinang	80				80	
3.27.03.2.02	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.	Jumlah prasarana pertanian	unit	Tanjungpinang	2	Rp 130.000.000			2	Rp 180.000.000
			Rasio kebutuhan dan ketersediaan prasarana peternakan.	%	Tanjungpinang	5				5	
3.27.03.2.0009	Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.	Sub Kegiatan Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Paket	Tanjungpinang	2	Rp 90.000.000	APBD Kota		3	Rp 130.000.000
3.27.03.2.02.0014	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Operasionalisasi Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun dan di rehabilitasi serta beroperasi								
3.27.03.2.00015		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	unit		2	Rp 40.000.000				Rp 50.000.000
3.27.04.	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER.	Status Kesehatan Hewan (%)	%	Tanjungpinang	99	Rp 120.000.000			99	Rp 160.000.000
			% Pangan Segar Asal Hewan Yang Memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu Pangan.	%	Tanjungpinang	78				79	
							Rp 30.000.000				Rp 40.000.000
3.27.04.2.01		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit.	%	Tanjungpinang	100				100	
3.27.04.2.01.01	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah ata kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	laporan	Tanjungpinang	1	Rp 30.000.000	APBD Kota		1	Rp 40.000.000
3.27.04.2.03.	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten / Kota.	Persentase Penyakit Hewan yang tertangani.	%	Tanjungpinang	85	Rp 40.000.000			87	Rp 60.000.000
3.27.04.2.03.02	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	laporan	Tanjungpinang	1	Rp 40.000.000	APBD Kota		1	Rp 60.000.000
3.27.04.2.04.	Kegiatan Penerpan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteiner.	Kegiatan Penerpan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteiner.	Jumlah Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarkat Veteriner.	unit usaha	Tanjungpinang	5	Rp 50.000.000			5	Rp 60.000.000
3.27.04.2.04.02	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	laporan	laporan	1	Rp 50.000.000	APBD Kota		1	Rp 60.000.000

Kode (Mengacu Kepmen 050)	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Sesuai Renstra OPD	Kegiatan / Sub Kegiatan Berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana (APBD, APBD Provinsi, APBN)		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2		4	5	6	11	12	9	10	11	12
3.27.07	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	Tanjungpinang	30	Rp 60.000.000			35	Rp 110.000.000
3.27.07.2.01	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah lahan yang dilakukan pengendalian dan bencana pertanian	Ha	Tanjungpinang	5	Rp 60.000.000			5	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	Tanjungpinang	5	Rp 60.000.000			5	Rp 110.000.000
3.27.07.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN.	Persentase Penyuluhan	%	Tanjungpinang	95	Rp 120.000.000	APBD		100	Rp 160.000.000
			Peningkatan status kelembagaan tani ternak	%		5				5	
3.27.07.2.01.	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.	Jumlah Penyuluhan	%		60	Rp 120.000.000			70	Rp 160.000.000
3.27.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	Tanjungpinang	62	Rp 50.000.000	APBD Kota		72	Rp 60.000.000
3.27.07.2.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	Tanjungpinang	10	Rp 20.000.000	APBD Kota		10	Rp 30.000.000
3.27.07.2.01.05	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota.	Sub Kegiatan Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten / Kota.	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	Tanjungpinang	3	Rp 50.000.000	APBD Kota		3	Rp 70.000.000
x	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG X.X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG X.X					Rp 150.000.000				Rp 150.000.000
x.xx		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			Tanjungpinang		Rp 150.000.000		Rp		Rp 150.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Tanjungpinang						
x.xx.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persen	Tanjungpinang	100	Rp 150.000.000			12	Rp 150.000.000
x.xx.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang meliputi Pendidikan dan Pelatihan	orang	Tanjungpinang	25	Rp 150.000.000			25	Rp 150.000.000

Tanjungpinang, Februari 2024
Kepala Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan
Kota Tanjungpinang,

YONI FADRI
Pembina Tingkat I
NIP. 19700503 200312 1 016

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang tahun 2025 ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang ini disusun sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang dananya bersumber dari APBD Pemerintah Kota Tanjungpinang, APBD Provinsi dan APBN, sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja ini dengan sebaik-baiknya. Renja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan RAPBD Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Februari 2024
Kepala Dinas Pertanian Pangan dan
Perikanan

Kota Tanjungpinang,



YONI FADRI

Pembina Tk.I

NIP. 19700503 200312 1 006